

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 284 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MARGAASIH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Margaasih untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Margaasih untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN MARGAASIH

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Margaasih merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Margaasih untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Margaasih yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Margaasih yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Margaasih bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Margaasih dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Margaasih dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Margaasih agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Margaasih;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Margaasih;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Margaasih.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN MARGAASIH

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Margaasih Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Margaasih dalam menyusun Renja Kecamatan Margaasih.

(2) Renstra Kecamatan Margaasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Margaasih paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Kecamatan Margaasih; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Margaasih.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Margaasih Tahun 2025-2029;
   2. strategi Kecamatan Margaasih dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Kecamatan Margaasih dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Margaasih; dan
   4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Margaasih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN MARGAASIH

Pasal 5

(1) Kecamatan Margaasih melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Margaasih dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Margaasih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Margaasih terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Margaasih.
(3) Camat Margaasih menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Margaasih.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN MARGAASIH

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Margaasih dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Margaasih mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Margaasih dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Margaasih, maka Renstra Kecamatan Margaasih dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Margaasih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Margaasih Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Margaasih terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Margaasih.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 284

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 284 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MARGAASIH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MARGAASIH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati (Bandung) Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, tugas pokok perangkat daerah Kecamatan adalah melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sebagai perangkat daerah yang berada di garis depan dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum, kecamatan memiliki peran strategis dalam menjawab berbagai kebutuhan dan dinamika masyarakat. Dalam konteks ini, kecamatan dituntut untuk mampu merespons kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan administrasi masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan wewenang dengan sebaik-baiknya, maka perlu disusun suatu dokumen perencanaan baik tahunan maupun jangka menengah yang disebut Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada dokumen RPJMD.

Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau pilihan yang menjadi kewenangan daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra juga menjabarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja program yang terukur sebagai tolok ukur capaian pelaksanaan pembangunan.

Adapun proses penyusunan Renstra Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 16 ayat (2) disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Selaras dengan sistem perencanaan nasional dan daerah, dokumen Renstra Kecamatan Margaasih Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan langsung dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, diantaranya:

a. Renstra Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dan merupakan pelaksanaan program-program pembangunan dari visi dan misi Bupati terpilih.
b. Renstra Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja

Kecamatan Margaasih setiap tahunnya selama kurun waktu 2025-2029.

Dengan adanya dokumen Renstra Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, setiap program dan kegiatan kecamatan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terukur, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu memastikan tercapainya tujuan pembangunan wilayah secara efektif dan efisien, serta turut berkontribusi dalam mewujudkan visi Kabupaten Bandung "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas".

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah, landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Margaasih Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 90);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Margaasih Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD dan dokumen perencanaan Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung yang menggambarkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 5 (lima) tahun dalam kurun waktu 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan arahan dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 ke dalam RKPD;
2. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Margaasih untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang urusan yang diampu oleh Pemerintah Kecamatan Margaasih, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban bagi pelaksanaan Pemerintah dan Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
3. Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung, sehingga upaya pembangunan yang menjadi tanggung jawab bidang urusan yang diampu OPD Kecamatan menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
4. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Merujuk pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MARGAASIH

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Margaasih.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Margaasih

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Margaasih.

Sumberdaya perangkat daerah merupakan aspek kewilayahan yang menggambarkan akan potensi perangkat daerah atas kewilayahan.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Margaasih

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Margaasih

Bagian ini memuat identifikasi dan deskripsi kelompok yang menjadi penerima manfaat utama dari program dan kegiatan yang direncanakan.

2.1.5 Mitra Kecamatan Margaasih dalam pemberian pelayanaan

Bagian ini memuat siapa saja Mitra Kecamatan Margaasih dalam Pemberian Pelayanaan

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Margaasih.

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

Bagian ini memuat Penelaahan RPJMN 2025-2029

2.2.2 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Bagian ini memuat tentang Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029

2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Bagian ini memuat penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

2.2.4 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai dengan Pelayanan Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

Bagian ini memuat analisis terhadap dokumen KLHS yang sesuai dengan pelayanan Kecamatan Margaasih

2.2.5 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Margaasih

Bagian ini memuat permasalahan pelayanan di Kecamatan Margaasih

2.2.6 Isu Strategis

Bagian ini memuat isu strategis di Kecamatan Margaasih

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Margaasih Tahun 2025 – 2029.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Margaasih Tahun 2025 - 2029.

3.2. Strategi Kecamatan Margaasih Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Margaasih Tahun 2025 – 2029.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi Kecamatan Margaasih dalam lima tahun mendatang.

3.3. Arah Kebijakan Kecamatan Margaasih Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan arah kebijakan Kecamatan Margaasih dalam lima tahun mendatang.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Pada bagian ini dikemukakan uraian program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif Kecamatan Margaasih

4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pada bagian ini dikemukakan uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan Daerah Kecamatan Margaasih Tahun 2025 - 2029.

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Margaasih Tahun 2025-2029 Melalui IKU Kecamatan Margaasih

Pada bagian ini dikemukakan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Margaasih Tahun 2025-2029 melalui IKU Kecamatan Margaasih

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui IKK

Pada bagian ini dikemukakan target kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bagian ini dikemukakan dituliskan kesimpulan akhir penulisan Renstra Kecamatan Margaasih

5.2 Kaidah pelaksanaan

Pada bagian ini dikemukakan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Margaasih

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pada bagian ini dikemukakan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MARGAASIH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Margaasih

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Margaasih

Kedudukan kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Camat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok : Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

Fungsi :

a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan. Yang terdiri dari

1. Sekretariat Kecamatan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut

Tugas Pokok : merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. penyelenggaraan dan mengoordinasikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
f. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya membawahkan Subbagian Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Subbag Program dan Keuangan.

Tugas Pokok : menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Subbagian Program dan Keuangan.

Fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi rencana strategis Kecamatan dan Daerah;

b. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja kecamatan;
c. Pelaaksanaan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi Kecamatan;
d. Penyusunan renncana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan, administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
f. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Kecamatan;
g. elaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan; dan
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.

3. Subbag Umum dan Kepegawaian.

Tugas Pokok : menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat , kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

Fungsi :

a. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
b. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Kecamatan;
c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsifan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepagawaian;
d. Pelaksanaan koordinaasi, integrase dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Pemerintahan.

Tugas Pokok : menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan.

Fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
c. Pelaksanaan koordinasi, integrase dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Tugas Pokok : menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tenis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
c. Pelaksanan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

6. Seksi Pembangunan.

Tugas Pokok :

menyiapkan bahan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan.

Fungsi :

a. Penyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;
c. Pelaksanaan kooordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan.

7. Seksi Sosial Budaya.

Tugas Pokok : menyiapkan bahan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya.

Fungsi;

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sosial Budaya;
c. Pelaksanaan kooordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya.

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Tugas Pokok : menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

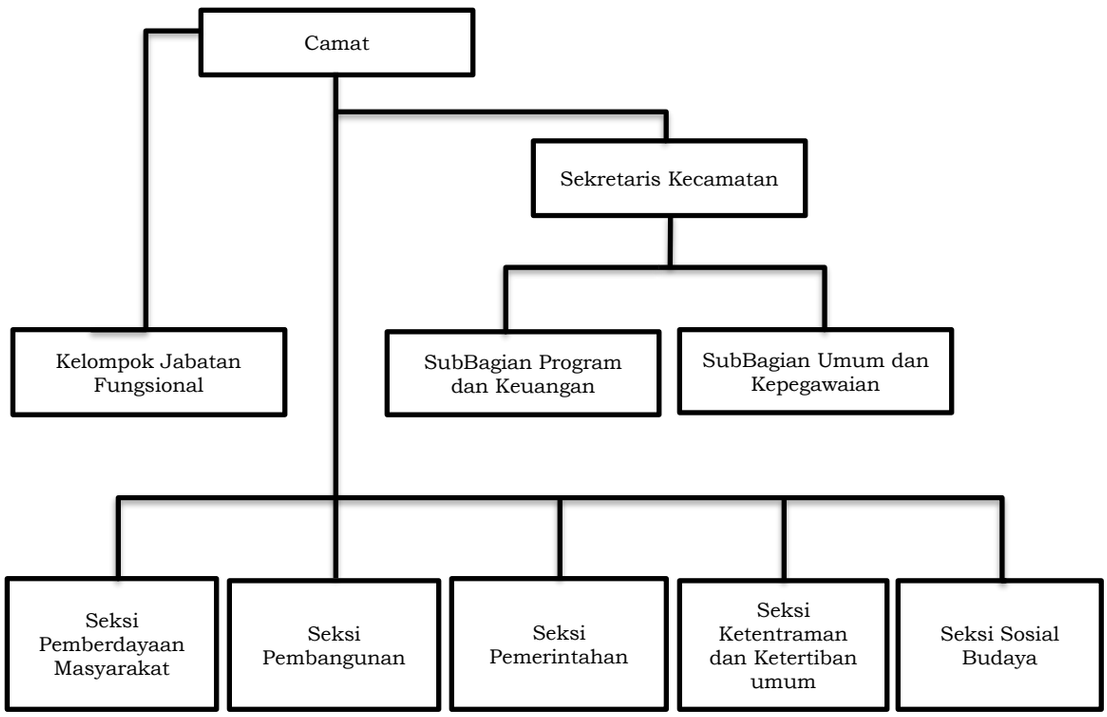
c. Pelaksanaan kooordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

9. Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok :Melaksanakan Sebagian kegiatan kecamatan secara professional berdasarkan disiplin ilmu dan heahlianya serta disesuaikan dengan kebutuhan

Gambaran organisasi tersebut dapat diperjelas melalui struktur organisasi Kecamatan Margaasih sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Margaasih



Sumber : Subbag Umpeg Kecamatan Margaasih, 2025

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Margaasih

a. Sumber Daya Manusia

Kecamatan Margaasih dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh 20 orang pegawai, terdiri dari 14 orang (PNS), 1 orang (CPNS), 2 orang (PPPK), dan 3 orang pegawai tidak tetap (sukwan). Apabila dibandingkan dengan beban kerja, hasil analisis jabatan dan kebutuhan organisasi yang ada, sangat perlu adanya penambahan

pegawai, dikarenakan banyak jabatan yang kosong, dikhususkan di subbagian program keuangan, dimana tidak adanya penyusun perencana program kegiatan yang berakibat kurangnya kualitas perencanaan di Kecamatan Margaasih dan juga tidak adanya pengolah data mengakibatkan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan tidak berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya sehingga sulit untuk tepat sasaran. Adapun SDM yang ada di Kecamatan Margaasih masih sangat perlu adanya kapasitas peningkatan SDM, baik melalui Pendidikan, pelatihan atau penambahan wawasan melalui pembinaan aparatur terhadap pengetahuan perundang – undangan maupun terhadap teknis pekerjaannya sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat menunjang terhadap target capaian. Keadaan personil Kecamatan Margaasih per Tanggal 1 Agustus 2025 adalah sebagaimana berikut:

Tabel. 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	16 orang
2	Perempuan	4 orang
JUMLAH		20 orang

Sumber : Umpeg Kecamatan Margaasih, 2025

Berdasarkan Tabel 2.1 Berdasarkan data distribusi pegawai Kecamatan Margaasih menurut jenis kelamin, dapat disimpulkan bahwa partisipasi laki-laki masih sangat mendominasi, namun kehadiran pegawai perempuan menunjukkan bahwa sudah terdapat keterlibatan gender yang inklusif dalam lingkungan kerja. Hal ini mencerminkan adanya upaya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam dunia kerja, khususnya di sektor pemerintahan. Ke depannya, potensi peningkatan keterwakilan perempuan sangat terbuka, seiring dengan komitmen terhadap kesetaraan dan profesionalisme aparatur sipil negara.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan MargaasihKabupaten Bandung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Pendidikan	Status Kepegawaian								Jumlah
		PNS		CPNS		PPPK		TKK		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SMA	3	0	0	0	1	0	2	1	7
4	D III	0	0	0	0	1	0	0	0	1
5	S1	4	3	1	0	0	0	0	0	8
6	S2	4	0	0	0	0	0	0	0	4
	Jumlah	11	3	1	0	2	0	2	1	20

Sumber : Umpeg Kecamatan Margaasih, 2025

Tabel 2.2 Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai di Kecamatan Margaasih memiliki tingkat pendidikan tinggi, dengan dominasi lulusan S1, diikuti oleh lulusan SMA dan S2. Tidak terdapat pegawai dengan pendidikan SD maupun SMP. Selain itu, status kepegawaian didominasi oleh PNS laki-laki, sementara jumlah pegawai perempuan masih relatif rendah di semua jenjang pendidikan dan status kepegawaian. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan gender.

Tabel 2.3
Data Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Margaasih
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025

No.	Pangkat dan Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pengatur, II/d	2	-	-
2.	Penata Muda, III/a	2	-	1
3.	Penata Muda Tk.1, III/b	2	1	1
4.	Penata, III/c	1		
5.	Penata Tk.1, III/d	3	2	
6.	Pembina, IV/a	1	-	5
7.	Pembina Tk.1, IV/b	1	-	1
	Jumlah	12 orang	3 Orang	15 orang

Sumber : Umpeg Kecamatan Margaasih, 2025

Dari table 2.3 pegawai Kecamatan Margaasih, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai berada pada jenjang golongan III, khususnya di tingkat Penata Muda dan Penata Muda Tingkat I. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada

jenjang menengah dalam struktur kepegawaian. Jumlah pegawai laki-laki juga jauh lebih dominan dibandingkan perempuan di hamper semua golongan, yang menunjukkan ketimpangan gender dalam distribusi jabatan. Selain itu, hanya sedikit pegawai yang telah mencapai golongan IV, menunjukkan masih terbatasnya pegawai dengan pengalaman atau masa kerja yang sangat panjang.

b. Sumber Daya Aset /BMD

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Margaasih tentunya harus diidukung dengan sumber daya lain seperti asset/modal, yang berada dalam kondisi layak dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Hasil Rekon Barang Milik Daerah Tahun 2023, kecamatan Margaasih memiliki asset/modal sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sumber Daya yang dimiliki (asset/modal)

No	Jenis Aset	Saldo Akhir (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	144.000.000,00	0,00	133.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.470.927.424,00	1.342.301.611,,00	128.625.814,00
3	Gedung dan Bangunan	2.037.856.226,00	630.485.672,00	1.407.370.554,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	14.550.000	0,00	14.550.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
TOTAL ASET TETAP		3.667.333.650,00	1.972.787.283,00	1.694.546.368,00
7	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
8	Aset Lain-Lain/Rusak Berat	121.196.668,00	121.196.668,00	0,00
9	Aset yang dimanfaatkan pihak lain	0,00	0,00	0,00
	Total Aset Lainnya	121.196.668,00	121.196.668,00	0,00
Total Aset Tetap + Aset Lainnya		3.788.530.318,00	2.093.983.051,00	1.694.546.368,00

Sumber : SubBag Umpeg Kecamatan Margaasih per Desember Tahun 2024 (hasil Rekonsiliasi Aset)

Dari table 2.4 diatas dikatehui bahwa berdasarkan saldo Akhir Jenis bahwa Total Asset tetap dan asset lainnya tahun 2024 sebesar Rp.3.788.530.318 terdiri dari dari asset tetap sebesar

Rp.3.667.333.650 dengan rincian tanah Rp.144.000.000 Peratanan dan mesin Rp.1.470.927.424 Gedung dan Bangunan Rp.2.037.856.226 dan asset tetap lainnya sebesar Rp.14.550.000 Sedangkan untuk Asset lainnya sebesar Rp. 121.196.668.

Tabel 2.5
Klasifikasi Aset berdasarkan Kondisi

No	Klasifikasi Kode Asset	Nilai Asset	Persentase
1	Baik	3.667.333.630,00	97
2	Rusak Berat	121.196.688,00	3
Jumlah		3.788.530.318,00	100

Sumber : SubBag Umpeg Kecamatan Margaasih per Desember Tahun 2024
(Simda BMD : Buku Inventaris Gabungan)

Dari tabel 2.5 kalau dilihat dari Klasifikasi Asset berdasarkan kondisi diatas diketahui bahwa Asset Baik Rp. 3.667.333.630,00 atau sebesar 97% dan Asset Rusak Rp. 121.196.688,00 atau sebesar 3% dari seluruh total asset yang ada

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Margaasih

Kecamatan Margaasih sebagai perangkat daerah di Kabupaten Bandung memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Untuk itu, penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan merupakan langkah strategis dalam menilai sejauh mana tujuan, sasaran, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dapat tercapai sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan. Kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Margaasih memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya, serta menjadi pijakan dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan pada peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi Terkait Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Margaasih

a. Luas Wilayah

Luas wilayah administrasi : 16,37 km^2, meliputi 6 (enam) wilayah desa, yaitu;

Tabel 2.6
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Margaasih

No	Nama Desa	Luas Wilayah (km²)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan (%)
1	Desa Margaasih	2,92	17,84
2	Desa Lagadar	3,19	19,49
3	Desa Nanjung	3,2	19,55
4	Desa Mekarrahayu	3	18,33
5	Desa Rahayu	2,85	17,41
6	Desa Cigondewah Hilir	1,21	7,39
Jumlah		16,37	100,00

Sumber: BPS, 2024

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Margaasih pada tahun 2025 berdasarkan Portal Satu Data Kabupaten Bandung adalah 146.477 jiwa. Berikut merupakan penjabaran demografi Kecamatan Margaasih per desa.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Kecamatan Margaasih 2025

No	Nama Desa	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km²)
1	Desa Margaasih	25.833	8847
2	Desa Lagadar	25.319	7937
3	Desa Nanjung	18.731	5853
4	Desa Mekarrahayu	35.710	11903
5	Desa Rahayu	27.464	9636
6	Desa Cigondewah Hilir	13.420	11091
Jumlah		146.477	8.948

Sumber: Portal Satu Data Kabupaten Bandung, 2025

Terlihat bahwa kepadatan penduduk di Desa Mekarrahayu lebih tinggi dari desa lainya, menunjukkan pola konsentrasi permukiman yang kuat di desa tersebut. Sebaliknya, desa seperti Nanjung merupakan wilayah dengan kepadatan terendah menunjukan lahan yang digunakan untuk pemukiman tidak sepadat desa lainya.

c. Proyeksi Jumlah Penduduk di Kecamatan Margaasih

Proyeksi jumlah penduduk dilakukan dengan pendekatan laju pertumbuhan rata-rata sekitar 1,15%—

1,25% per tahun. Angka ini mengacu pada laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat tahun 2025 (1,06%) serta tren Kabupaten Bandung yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata provinsi karena pengaruh urbanisasi, migrasi masuk, dan ekspansi wilayah metropolitan Bandung Raya. Luas wilayah diasumsikan tetap hingga 2030, kecuali apabila terdapat kebijakan pemekaran kecamatan/desa yang resmi.

Tabel 2.8
Tabel Proyeksi Jumlah Penduduk Per Desa 2025–2030

No	Nama Desa	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Desa Margaasih	25.833	26130	26431	26735	27042	27353
2	Desa Lagadar	25.319	25610	25905	26203	26504	26809
3	Desa Nanjung	18.731	18946	19164	19385	19608	19833
4	Desa Mekarrahayu	35.710	36121	36536	36956	37381	37811
5	Desa Rahayu	27.464	27780	28099	28422	28749	29080
6	Desa Cigondewah Hilir	13.420	13574	13730	13888	14048	14210
Jumlah		146.477	148161	149865	151589	153332	155095

Sumber: Hasil Analisis kecamatan Margaasih, 2025

Analisis tabel tersebut menunjukkan konsistensi pola distribusi penduduk antar desa. Desa Mekarrahayu diproyeksikan selalu menduduki posisi jumlah penduduk tertinggi.

d. Batasan Wilayah

Utara : Kota Cimahi
Timur : Kecamatan Margahayu
Selatan : Kecamatan Kutawaringin dan Kecamatan Katapang
Barat : Kabupaten Bandung Barat

e. Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Margaasih

Kinerja adalah cerminan dari tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Selain menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Kecamatan Margaasih juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah melalui pelimpahan wewenang dari Bupati.

Pelimpahan kewenangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mengoptimalkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, sebagai perangkat daerah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan ini diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

Rincian lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan ini dijabarkan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat. Pelimpahan wewenang ini bersifat delegatif, mencakup kewenangan yang seragam untuk seluruh camat dan kewenangan khusus yang diberikan kepada camat tertentu.

Adapun kewenangan yang dilimpahkan di Kecamatan Margaasih secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik

Dalam hal pelayanan publik, Kecamatan Margaasih bertanggung jawab memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, seperti pengurusan surat

keterangan, fasilitasi dokumen kependudukan, hingga layanan pengaduan masyarakat.

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Melalui pemberdayaan masyarakat desa, kecamatan berfungsi mendorong pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini dilakukan dengan membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok usaha mikro, serta mendukung kegiatan organisasi kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna, dan kelompok tani. Upaya pemberdayaan ini bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat serta partisipasi dalam pembangunan desa.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum menjadikan kecamatan sebagai perpanjangan tangan bupati. Kecamatan bertugas menjaga stabilitas wilayah, memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, mengoordinasikan penanggulangan bencana, hingga memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga atau antar desa. Fungsi ini penting untuk memastikan pemerintahan berjalan tertib dan harmonis.

4. Penunjang Pemerintahan Daerah

Kecamatan Margaasih berperan sebagai penghubung koordinasi antara perangkat daerah dengan pemerintah desa. Kecamatan juga membantu sinkronisasi program pembangunan daerah dengan aspirasi desa serta menyediakan data sektoral sebagai dasar perencanaan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan daerah dapat terimplementasi lebih tepat sasaran.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dimana Kecamatan Margaasih diposisikan sebagai fasilitator keamanan wilayah. Melalui koordinasi dengan kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Linmas, kecamatan berupaya menjaga kondusifitas wilayah, mencegah

konflik sosial, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi peraturan.

6. Pembinaan dan Pengawasan Desa

Kecamatan Margaasih memiliki tanggung jawab membina kepala desa dan perangkatnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Kecamatan juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, memberikan arahan dalam penyusunan peraturan desa, serta membantu menyelesaikan permasalahan antara pemerintah desa dan masyarakat.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Margaasih dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Indikator-indikator ini tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Kecamatan Margaasih tahun 2021-2026.

Berikut adalah tabel yang menyajikan data target, realisasi, dan capaian tujuan serta sasaran Kecamatan Margaasih selama periode 2021-2024.

Tabel 2.9
Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Margaasih Tahun 2021-2026 Kecamatan Margaasih

INDIKATOR KINERJA	Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Margaasih Tahun 2021-2026							
	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Nilai AKIP	55	61,31	64	70,99	72	74,33	75	76,2
Persentase BMD dalam kondisi baik	85	87,5	85	87,50	87,50	88	87,50	88%
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	86,13	84,00	85,68	86,00	87,55	87,00	90,28
Persentase desa beradministrasi baik	N/A	N/A	100	100	100	100	N/A	N/A

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Margaasih, 2025

Dari Tabel 2.9 di atas Kecamatan Margaasih mempunyai 4 indikator sasaran dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. Capaian IKM

   Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh selalu melebihi target, dikarenakan adanya faktor pendorong yang memungkinkan target yang dicapai terus mengalami peningkatan, hal tersebut dikarenakan adanya didukung adanya sumber daya yang terdiri dari sarana dan prasarana yang memadai, serta SDM layanan yang melakukan peran dan tugasnya secara optimal sehingga pelayanan dapat berjalan cepat dan efektif.

b. Capaian Target Nilai AKIP

   Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja ditujukan pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) capaian nya selalu melampaui target, dan berada pada kategori BB dan pada tahun 2024 meraih nilai 76,2 kategori BB dengan kriteria interpretasi “Sangat Baik”, adapun variabel yang menjadi dasar evaluasi penilaian ini adalah perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%).

c. Capaian Target BMD dalam kondisi baik

   Capaian BMD dari tahun ke tahun selalu memenuhi target yaitu 100%, yang artinya BMD setiap tahun terpelihara dengan baik.

d. Capaian Target Persentase Desa Beradministrasi Baik

   Capaian Persentase Desa Beradministrasi Baik dalam dua tahun pelaksanaan dari 6 desa, semua desa selalu beradministrasi baik dengan capaian 100%

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Margaasih pada Renstra Tahun 2021- 2026 Mencakup Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Kinerja pelayanan Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung yang telah dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun mulai dari tahun 2022-2024 menunjukkan tingkat capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung

NO	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	65,00 Poin	72,00 Poin	72,00 Poin	72,00 Point	72,00 Point	70,00 Poin	75,00 Poin	76,30 Poin	76,00 Point	0%	107,69%	104,17%	105,97%	105,56%	0%
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	86,50 %	86,50 %	86,50 %	86,50 %	86,50 %	86,50 %	86,50 %	86,50 %	0%	0%	100,00%	100,00%	100%	0%	0%
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0 %	0 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0 %	0 %
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Point	0 Point	0 Point	72,00 Point	72,00 Point	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0%	0%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0%	0%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0%	0%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	66,67%	0%
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00 Laporan	4,00 Laporan	4,00 Laporan	4,00 Laporan	4,00 Laporan	4,00 Laporan	2,00 Laporan	4,00 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	100,00%	50,00%	100,00%	0%	0%
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0%	0%	0%	0%

NO	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	0 Data	0 Data	1 Data	1 Data	0 Data	0 Data	0 Data	0 Data	0 Data	0%	0%	0%	0%	0%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	0 %	100,00 %	100,00 %	0%	0%	0 %	100,00 %	100,00 %	0%	0%	0%	100,00%	100,00%	0%	0%
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20,00 Orang/Bulan	21,00 Orang/Bulan	22,00 Orang/bulan	20,00 Orang/bulan	20,00 Orang/bulan	23,00 Orang/Bulan	28,00 Orang/Bulan	17,00 Orang/bulan	20,00 Orang/bulan	0 Orang / Bulan	115,00%	133,33%	77,27%	100,00%	0%
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0%	0%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0%	0%	100,00%	100,00%	100,00%		0%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu	0%	0%	0%	100,00 %	100,00 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang / Bulan	0 Orang / Bulan	0 Orang / Bulan	20,00 Orang/bulan	20,00 Orang/bulan	0 Orang / Bulan	0 Orang / Bulan	0 Orang / Bulan	0 Orang / Bulan	0 Orang / Bulan	0%	0%	0%	0%	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	0%	100,00 %	100,00 %	0%	0%	0%	100,00 %	100,00 %	0%	0%	0%	100,00%	100,00%	0%	0%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	2 Paket	1 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	200,00%	100,00%	100,00%	0%
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	1 Paket	3 Paket	1 Paket	5 Paket	0 Paket	100,00%	300,00%	100,00%	100,00%	0%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	0 Paket	5 Paket	5 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	0%	100,00%	0%	0%
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0%

NO	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	100,00%	75,00%	100,00%	50,00%	0%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	0 laporan	100,00%	75,00%	100,00%	50,00%	0%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	393 Laporan	393 Laporan	20 Laporan	11 Laporan	20 Laporan	196 Laporan	0 laporan	100,00%	55,00%	100,00%	49,87%	0%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100,00%	0%	0%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 unit	0 Unit	100,00%	0%	100,00%	0%	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100,00%	100,00%	0%	0%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	299 Laporan	223 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	0 laporan	99,67%	74,33%	100,00%	300,00%	0%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	72 Laporan	95 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	8 Laporan	95 Laporan	39 Laporan	0 Laporan	66,67%	11,11%	100,00%	81,25%	0%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100,00%	0%	0%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	10 Unit	11 Unit	11 Unit	9 Unit	7 Unit	10 Unit	11 Unit	0 Unit	100,00%	77,78%	100,00%	100,00%	0%

NO	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	0%	0%	100,00%	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	100,00%	0%	100,00%	0%	0%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai IKM	85 Poin	86 Poin	87 Poin	0 Poin	0 Poin	85 Poin	86 Poin	87 Poin	0 Poin	0 Poin	100,00%	100,00%	100,00%	0%	0%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Prosentase Urusan Pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100,00%	100,00%	100,00%	0%	0%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan yang dilimpahkan	6 Laporan	1 Laporan	9 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	9 Laporan	3 Laporan	0 Laporan	33,33%	300,00%	100,00%	60,00%	0%
		Persentase desa yang beradministrasi baik	100,00 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100,00 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100,00%	0%	0%	0%	0%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0 %	0 %	100,00 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100,00 %	0 %	0 %	0%	0%	100,00%	0%	0%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100,00%	0%	0%	0%	0%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0 %	100 %	0 %	100 %	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %		100,00%	0%	0%	0%
		Nilai AKIP	0 Poin	0 Poin	73 Poin	76 Poin	77 poin	0 Poin	0 Poin	76,00 Poin	0%	0%	0%	0%	104,11%	0%	0%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	100,00%	100,00%	100,00%	0%	0%

NO	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Wilayah Kecamatan																
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0%	0%	0%	0%	0%
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0%	0%	0%	0%
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0%	0%	0%	0%
	Pembentukan Dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%	0%	0%	0%	0%
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%	0%	0%	0%	0%

NO	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat Dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%	0%	0%	0%	0%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan Dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%	0%	0%	0%	0%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%	0%	0%	0%	0%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi Dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%	0%	0%	0%	0%
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%	0%	0%	0%	0%

NO	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%	0%	0%	0%	0%
	Penumbuhan Dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%	0%	0%	0%	0%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	0 %	100%	100%	100 %	100 %	0 %	100%	100%	0%	100,00%	0%	100,00%	0%
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0%	0%	0%	100,00%	0%
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0%	0%	0%	0%
	Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 %	100%	0 %	0 %	0 %	0 %	100%	0 %	0 %	0 %	0%	100,00%	0%	0%	0%

NO	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	0 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	100,00%	100,00%	0%	0%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	0 %	100,00 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100,00 %	0 %	0 %	0 %	0%	100,00%		0%	0%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	0 %	100,00 %	100,00 %	0 %	0 %	0 %	100,00 %	100,00 %	0 %	0 %	0%	100,00%	100,00%	0%	0%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0 Orang	50 Orang	100 Orang	50 Orang	50 Orang	0 Orang	50 Orang	100 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	100,00%	100,00%	100,00%	0%

NO	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Kesatuan Republik Indonesia																
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0 Orang	50 Orang	350 Orang	50 Orang	50 Orang	0 Orang	50 Orang	350 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	100,00%	100,00%	0%	0%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	0%	0%	100,00%	50,00%	0%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa yang dibina dan Diawasi	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0 %	0 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %			100,00%	100,00%	100,00%		0%
	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0 %	0 %	0 %	100,00 %	100,00 %	0 %	0 %	0 %	100,00 %	100,00 %	0%	0%	0%	100,00%	0%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	66,67%	100,00%	0%	0%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0%	0%	0%	0%

NO	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Pendayagunaan Aset Desa	Pendayagunaan Aset Desa															
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0%	0%	0%	0%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0 Dokumen	8 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	8 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	100,00%	0%	100,00%	0%

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Margaasih, 2025

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Anatara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp5.232.469.000	Rp4.832.156.793	Rp5.345.061.238	Rp4.715.760.000	Rp5.002.523.008	Rp4.382.197.385	Rp3.041.726.443	Rp4.206.860.120	Rp0	Rp0	84%	63%	79%	0%	0%	-0,55%	75,13%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp10.000.000	Rp48.569.273	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp10.056.008	Rp9.999.900	Rp21.433.107	Rp12.499.200	Rp0	Rp0	100%	44%	100%	0%	0%	58,38%	81,37%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp10.000.000	Rp20.000.000	Rp10.000.000	Rp8.000.000	Rp5.556.008	Rp9.999.900	Rp9.829.007	Rp9.999.500	Rp0	Rp0	100%	49%	100%	0%	0%	-0,11%	83,05%

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Anatara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp0	Rp28.569.273	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp0	Rp11.604.100	Rp2.499.700	Rp0	Rp0	0%	41%	100%	0%	0%	-22,81%	46,87%
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.660.431.000	Rp4.393.007.520	Rp4.728.322.238	Rp4.257.700.000	Rp4.515.687.000	Rp3.836.920.017	Rp2.839.968.191	Rp3.660.643.952	Rp0	Rp0	82%	65%	77%	0%	0%	-0,40%	74,80%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.600.431.000	Rp4.385.507.520	Rp4.720.822.238	Rp4.247.700.000	Rp4.505.687.000	Rp3.813.522.917	Rp2.839.968.191	Rp3.653.144.552	Rp0	Rp0	83%	65%	77%	0%	0%	-0,19%	75,01%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp52.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.897.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	30%	0%	0%	0%	0%	0,00%	10,09%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.499.900	Rp0	Rp2.499.800	Rp0	Rp0	100%	0%	100%	0%	0%	0,00%	66,66%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.499.900	Rp0	Rp2.499.800	Rp0	Rp0	100%	0%	100%	0%	0%	0,00%	66,66%
Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tahun	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp2.499.900	Rp0	Rp2.499.800	Rp0	Rp0	100%	0%	100%	0%	0%	0,00%	66,66%

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Anatara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp24.930.000	Rp10.000.000	Rp24.990.000	Rp0	Rp0	100%	40%	100%	0%	0%	-16,00%	79,89%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000			Rp24.930.000	Rp10.000.000	Rp24.990.000	Rp0	Rp0	100%	40%	100%	0%	0%	0,00%	79,89%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp0	Rp0	Rp0	Rp23.000.000	Rp22.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	-1,09%	0,00%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	12,50%	0,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.500.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	-10,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp112.179.000	Rp87.500.000	Rp85.559.000	Rp132.000.000	Rp53.500.000	Rp109.894.300	Rp52.537.100	Rp85.310.600	Rp0	Rp0	98%	60%	100%	0%	0%	-5,88%	85,91%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp4.993.000	Rp3.735.000	Rp4.970.400	Rp0	Rp0	100%	75%	99%	0%	0%	-8,00%	91,32%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp88.179.000	Rp33.000.000	Rp50.500.000	Rp10.000.000	Rp15.000.000	Rp86.116.300	Rp15.372.200	Rp50.497.700	Rp0	Rp0	98%	47%	100%	0%	0%	-7,95%	81,41%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp0	Rp0	Rp11.059.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.059.000	Rp0	Rp0		0%	100%	0%	0%	-50,00%	33,33%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp2.000.000	Rp2.500.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.500.000	Rp2.000.000	Rp1.999.900	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	100%	80%	100%	0%	0%	6,00%	93,33%

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Anatara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp3.000.000	Rp1.950.000	Rp1.900.000	Rp1.995.500	Rp0	Rp0	98%	95%	100%	0%	0%	10,00%	97,43%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp5.000.000	Rp25.000.000	Rp5.000.000	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp4.945.000	Rp18.350.000	Rp4.940.000	Rp0	Rp0	99%	73%	99%	0%	0%	132,00%	90,37%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp10.000.000	Rp20.000.000	Rp10.000.000	Rp80.000.000	Rp20.000.000	Rp9.890.000	Rp11.180.000	Rp9.848.000	Rp0	Rp0	99%	56%	98%	0%	0%	135,00%	84,43%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp10.000.000	Rp0	Rp10.000.000	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp9.892.240	Rp0	Rp9.806.100	Rp0	Rp0	99%	0%	98%	0%	0%	-30,00%	65,66%
Pengadaan Mebel	Rp10.000.000	Rp0	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp9.892.240	Rp0	Rp9.806.100	Rp0	Rp0	99%		98%	0%	0%	0,00%	65,66%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	-30,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp189.859.000	Rp207.080.000	Rp259.680.000	Rp179.560.000	Rp280.780.000	Rp171.982.540	Rp81.879.145	Rp217.847.842	Rp0	Rp0	91%	74%	84%	0%	0%	12,00%	82,96%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp2.990.000	Rp2.232.000	Rp2.996.000	Rp0	Rp0	100%	35%	100%	0%	0%	0,00%	78,29%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp38.400.000	Rp62.400.000	Rp65.000.000	Rp38.400.000	Rp34.000.000	Rp26.408.092	Rp22.047.145	Rp34.178.082	Rp0	Rp0	69%	41%	53%	0%	0%	2,86%	54,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp148.459.000	Rp141.680.000	Rp191.680.000	Rp138.160.000	Rp243.780.000	Rp142.584.448	Rp57.600.000	Rp180.673.760	Rp0	Rp0	96%	0%	94%	0%	0%	15,85%	63,43%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp225.000.000	Rp71.000.000	Rp224.000.000	Rp81.000.000	Rp105.000.000	Rp218.578.388	Rp35.908.900	Rp195.762.426	Rp0	Rp0	97%	64%	87%	0%	0%	22,57%	82,89%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp35.000.000	Rp56.000.000	Rp79.000.000	Rp56.000.000	Rp100.000.000	Rp29.669.600	Rp35.908.900	Rp54.204.100	Rp0	Rp0	85%	0%	69%	0%	0%	30,11%	51,13%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Anatara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp190.000.000	Rp15.000.000	Rp145.000.000	Rp20.000.000		Rp188.908.788	Rp0	Rp141.558.326	Rp0	Rp0	99%	0%	98%	0%	0%	117,67%	65,68%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp181.500.000	Rp220.929.800	Rp384.120.711	Rp214.500.000	Rp230.809.300	Rp180.996.100	Rp83.698.500	Rp369.402.000	Rp0	Rp0	100%	38%	96%	0%	0%	11,81%	77,93%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp181.500.000	Rp220.929.800	Rp384.120.711	Rp214.500.000	Rp230.809.300	Rp180.996.100	Rp83.698.500	Rp369.402.000	Rp0	Rp0	100%	38%	96%	0%	0%	11,81%	77,93%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp181.500.000	Rp220.929.800	Rp384.120.711	Rp214.500.000	Rp230.809.300	Rp180.996.100	Rp83.698.500	Rp369.402.000	Rp0	Rp0	100%	0%	96%	0%	0%	11,81%	65,30%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp155.000.000	Rp89.000.000	Rp249.121.730	Rp29.975.000	Rp22.938.000	Rp152.745.600	Rp0	Rp0	100%	76%	99%	0%	0%	110,80%	91,64%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp155.000.000	Rp35.000.000	Rp119.741.730	Rp29.975.000	Rp22.938.000	Rp152.745.600	Rp0	Rp0	100%	76%	99%	0%	0%	116,27%	91,64%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp155.000.000	Rp35.000.000	Rp119.741.730	Rp29.975.000	Rp22.938.000	Rp152.745.600	Rp0	Rp0	100%	0%	99%	0%	0%	116,27%	66,15%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.000.000	Rp57.380.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	93,45%	0,00%
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp17.380.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	123,80%	0,00%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	250,00%	0,00%
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Anatara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp34.000.000	Rp72.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	55,88%	0,00%
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	50,00%	0,00%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	50,00%	0,00%
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	50,00%	0,00%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	50,00%	0,00%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	70,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Anatara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	50,00%	0,00%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	70,00%	0,00%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	70,00%	0,00%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	70,00%	0,00%
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	50,00%	0,00%
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	50,00%	0,00%
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	50,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Anatara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp34.000.000	Rp50.000.000	Rp24.987.500	Rp0	Rp24.936.000	Rp0	Rp0	100%	0%	100%	0%	0%	16,61%	66,56%
70104201 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%	0,00%
701042010001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	150,00%	0,00%
701042010002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	50,00%	0,00%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp24.000.000	Rp20.000.000	Rp24.987.500	Rp0	Rp24.936.000	Rp0	Rp0	100%	0%	100%	0%	0%	-4,13%	66,56%
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp24.000.000	Rp20.000.000	Rp24.987.500	Rp0	Rp24.936.000	Rp0	Rp0	100%	0%	100%	0%	0%	-4,13%	66,56%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp50.000.000	Rp40.070.000	Rp161.500.000	Rp47.500.000	Rp71.998.373	Rp49.932.000	Rp38.993.800	Rp161.371.686	Rp0	Rp0	100%	97%	100%	0%	0%	52,83%	99,03%

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Anatara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp50.000.000	Rp40.070.000	Rp161.500.000	Rp47.500.000	Rp71.998.373	Rp49.932.000	Rp38.993.800	Rp161.371.686	Rp0	Rp0	100%	92%	100%	0%	0%	52,83%	97,18%
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp25.000.000	Rp12.500.000	Rp25.000.000	Rp12.000.000	Rp31.998.373	Rp25.000.000	Rp11.468.800	Rp24.936.000	Rp0	Rp0	100%	100%	100%	0%	0%	32,93%	99,86%
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp25.000.000	Rp27.570.000	Rp87.500.000	Rp12.500.000	Rp10.000.000	Rp24.932.000	Rp27.525.000	Rp87.445.200	Rp0	Rp0	100%	0%	100%	Rp0,00	Rp0,00	24,39%	66,56%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp0	Rp0	Rp49.000.000	Rp23.000.000	Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp48.990.486	Rp0	Rp0	0%	0%	100%	0%	0%	15,22%	33,33%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp60.000.000	Rp43.091.000	Rp93.808.600	Rp45.000.000	Rp35.000.000	Rp59.979.500	Rp34.406.500	Rp93.172.600	Rp0	Rp0	100%	80%	99%	0%	0%	3,05%	93,04%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp60.000.000	Rp43.091.000	Rp93.808.600	Rp45.000.000	Rp35.000.000	Rp59.979.500	Rp34.406.500	Rp93.172.600	Rp0	Rp0	100%	57%	99%	0%	0%	3,05%	85,54%

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Anatara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp40.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp19.985.500	Rp11.468.500	Rp39.385.000	Rp0	Rp0	100%	99%	98%	0%	0%	2,50%	99,24%
701062010003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
701062010005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp0		Rp0	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp40.000.000	Rp23.091.000		Rp25.000.000	Rp20.000.000	Rp39.994.000	Rp22.938.000	Rp0	Rp0	Rp0	100%	0%	0%	0%	0%	-10,00%	33,33%
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp0	Rp0	Rp53.808.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp53.787.600	Rp0	Rp0	0%	0%	100%	0%	0%	0,00%	33,32%

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Margaasih, 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Margaasih

Untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan tepat sasaran, Kecamatan Margaasih sebagai garda terdepan pemerintahan bertanggung jawab memastikan berbagai layanan dasar dapat diakses dengan cepat, mudah, dan efisien. Layanan-layanan ini mencakup administrasi kependudukan, pelayanan sosial, hingga program pemberdayaan masyarakat.

Secara umum, kelompok sasaran layanan di Kecamatan Margaasih dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Masyarakat Umum: Mencakup seluruh warga yang membutuhkan layanan administrasi umum, seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, serta layanan informasi dan pengaduan.
b. Kelompok Rentan: Kategori ini mencakup lansia, penyandang disabilitas, keluarga miskin, dan korban bencana. Mereka menjadi prioritas untuk menerima layanan khusus, seperti program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
c. Pemerintah Desa: Kecamatan memberikan layanan rekomendasi dan fasilitasi, khususnya dalam proses pencairan keuangan desa.

2.1.5 Mitra Kecamatan Margaasih dalam Pemberian Pelayanan

Dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan publik, Kecamatan Margaasih tidak bekerja sendirian. Terdapat berbagai pihak yang menjadi mitra strategis dan berperan penting dalam memastikan layanan berjalan optimal. Kemitraan ini mencakup kolaborasi dengan berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung serta lembaga lain, sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

1. Pemerintah Desa

   Sebagai perpanjangan tangan kecamatan di tingkat desa, pemerintah desa menjadi mitra terdekat dalam memberikan layanan langsung kepada masyarakat, karena mereka adalah garda terdepan di tingkat paling bawah.

2. Perangkat Daerah Terkait

   Kecamatan Margaasih berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung dalam hal pelayanan yang bersifat sektoral, seperti:

   - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil): Menjadi mitra utama dalam layanan administrasi kependudukan, termasuk penerbitan KTP-El dan Kartu Keluarga.
   - Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa : Bekerja sama dalam penanganan kemiskinan, pemberdayaan kelompok rentan (lansia, disabilitas, anak terlantar), serta pendampingan program bantuan sosial (PKH, BPNT, BST, dll).
   - Dinas Kesehatan dan Puskesmas Setempat : Berkolaborasi dalam penyelenggaraan program kesehatan masyarakat, vaksinasi, pencegahan penyakit, serta pendataan kesehatan warga. Puskesmas berperan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer di tingkat kecamatan.
   - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mitra utama dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk penguatan kapasitas aparatur desa dan pengelolaan dana desa.
   - Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam penanganan bencana alam maupun non-alam, kesiapsiagaan, serta mitigasi risiko bencana di wilayah kecamatan.
   - Satuan Polisi Pamong Praja, dalam penegakan perda, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
   - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, sebagai mitra dalam perencanaan pembangunan, sinkronisasi program, dan penyelarasan arah kebijakan dengan RPJMD Kabupaten Bandung.
   - Dinas Lingkungan Hidup, terkait pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta pelestarian lingkungan hidup.

- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DALDUKPPA): Menjadi mitra penting dalam program pengendalian penduduk, pelayanan KB, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Kolaborasi dilakukan melalui pendampingan, sosialisasi, penanganan kasus, dan penguatan kapasitas aparat desa/kelurahan serta kader PKK dan Posyandu.

3. Instansi Vertikal

   Instansi vertikal adalah perangkat pemerintahan pusat yang ada di daerah, yang struktur organisasinya langsung berada di bawah kementerian/lembaga, bukan di bawah pemerintah daerah. Meski begitu, dalam praktik pelayanan publik, instansi vertikal sering menjadi mitra penting kecamatan seperti:

   - Kepolisian Sektor (Polsek), mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
   - Komando Rayon Militer, mitra dalam bidang pertahanan dan ketahanan wilayah.
   - Kantor Urusan Agama, mitra dalam pelayanan urusan keagamaan, khususnya pencatatan pernikahan, pembinaan kehidupan beragama, zakat, dan wakaf.
   - Kantor Pertanahan/BPN, mitra dalam urusan pertanahan, seperti sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan program pendaftaran tanah sistematis.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Margaasih

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

Penyusunan Renstra Kecamatan Margaasih 2025-2029 mengacu pada kerangka kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dokumen yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, menjadi fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

RPJMN 2025-2029 memuat strategi pembangunan nasional, program lintas kementerian/lembaga, serta arah pembangunan kewilayahan. Kecamatan Margaasih, sebagai bagian integral dari Kabupaten Bandung, harus menyelaraskan renstranya dengan visi nasional ini.

Visi RPJMN 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045," diimplementasikan melalui delapan prioritas nasional yang juga dikenal sebagai "Asta Cita." Prioritas-prioritas ini meliputi berbagai sektor, antara lain:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM): Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan peran perempuan serta penyandang disabilitas.
b. Transformasi Ekonomi: Melanjutkan hilirisasi industri, mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya alam, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
c. Tata Kelola Pemerintahan: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan korupsi.
d. Pembangunan Kewilayahan: Fokus pada pembangunan dari desa dan wilayah bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Sebagai perangkat daerah, Kecamatan Margaasih memiliki peran vital dalam menerjemahkan prioritas nasional ke dalam konteks lokal. Keterkaitan antara RPJMN 2025-2029 dan penyusunan renstra kecamatan dapat dilihat dari beberapa aspek:

a. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan: Salah satu prioritas nasional, yaitu reformasi birokrasi, sangat relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Margaasih. Renstra kecamatan harus memuat program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.
b. Pembangunan Kewilayahan: Prioritas pembangunan dari desa dan wilayah bawah menjadi landasan bagi Kecamatan

Margaasih untuk menyusun program yang mendukung desa-desa di wilayahnya. Ini mencakup program pemberantasan kemiskinan, peningkatan ekonomi desa, dan pengembangan infrastruktur dasar.

c. Peningkatan Kualitas SDM: Meskipun lingkupnya lebih kecil, Kecamatan Margaasih dapat mendukung prioritas ini melalui program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan sosial dasar bagi masyarakat, seperti layanan kesehatan dan pendidikan.

Dengan menyelaraskan Renstra Kecamatan Margaasih dengan RPJMN 2025-2029, perencanaan pembangunan di tingkat lokal akan menjadi bagian dari upaya nasional yang lebih besar, memastikan program-program yang dijalankan saling mendukung dan berkontribusi pada pencapaian tujuan Indonesia Emas 2045.

2.2.2 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang memuat perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah pada periode tahun 2025-2029 yang terintegrasi dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Selain itu, RPJMD dirancang untuk menyusun kebijakan yang holistik, tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sebelumnya. Dokumen RPJMD disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Bupati Bandung terpilih, serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah.

Perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan tahapan yang penting karena berpengaruh langsung terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan pada tahapan selanjutnya. Untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis

permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi kabupaten bandung beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pembangunan utama di Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan misi 3 “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel” adalah

1. Prosedural Birokrasi yang Panjang.
   Permasalahan ini disebabkan oleh sistem yang kurang efisien, transparansi yang rendah, serta birokrasi yang belum responsif terhadap perubahan. Keterbatasan transparansi dan aksesibilitas informasi layanan public juga turut memperumit prosedur administrasi dan menghambat efektivitas layanan
2. Belum optimalnya penerapan (SPBE).
   Penerapan SPBE masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya investasi pada infrastruktur IT, rendahnya adopsi teknologi oleh aparatur, serta minimnya integrasi dan transparansi dalam pengelolaan informasi publik. Selain itu, pengambilan kebijakan juga masih menghadapi tantangan.
3. Pengambilan kebijakan dan program pembangunan belum sepenuhnya berdasarkan hasil kelitbangan.
   Kurangnya analisis mendalam dan minimnya partisipasi pemangku kepentingan menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya berbasis data yang valid dan relevan. Hambatan struktural dan operasional juga seringkali menghambat eksekusi kebijakan yang telah direncanakan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi birokrasi yang lebih efisien, peningkatan adopsi teknologi dalam tata Kelola pemerintahan, serta penguatan sistem penelitian dan analisis data sebagai dasar dalam proses perumusan kebijakan.

2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024 – 2044 dijelaskan bahwa Penataan Ruang Kabupaten Bandung adalah proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung.

Kecamatan Margaasih sebagai salah satu Wilayah yang termasuk dalam lingkup wilayah Kabupaten bandung dalam menentukan Rencana Stategis sangat memperhatikan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah tersebut diatas.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkaitan dengan Rencana struktur ruang Wilayah Kecamatan Margaasih adalah sebagai berikut:

a. Sistem Pusat Permukiman berupa Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan;
b. sistem jaringan transportasi berupa Jalan Arteri Sekunder diantaranya Akses Keluar-Masuk Tol Margaasih, Akses Tol Margaasih II dan Taman Kopo Indah;
c. Sistem Jaringan Energi berupa Jaringan Insfrastruktur Ketenagalistrikan yang melintasi Kecamatan Margaasih diantaranya SUTT Cigereleng – Cianjur (2), SUTT Cigereleng – Lagadar (1), dan SUTT Cigereleng – Cikalong (2);
d. Sistem Jaringan Telekomunikasi berupa Jaringan Tetap;
e. Sistem Jaringan Sumber Daya Air berupa Jaringan Pengendalian Banjir, Bangunan Pengendali Banjir, dan Bangunan Sumber Daya Air;
f. Sistem Pengolahan Air Limbah berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
g. Sistem jaringan persampahan berupa TPS3R; dan
h. Sistem Drainase berupa Jaringan Drainase Primer dan Jaringan Drainase Sekunder;

Adapun Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkaitan dengan Rencana pola ruang yang berkaitan dengan Wilayah Kecamatan Margaasih adalah sebagai berikut.

a. Kawasan Lindung berupa Badan Air;
b. Kawasan Perlindungan Setempat;
c. Kawasan Pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Hortikultura;
d. Kawasan Pertambangan dan Energi berupa Kawasan Pertambangan Mineral;
e. Kawasan Peruntukan Industri;
f. Kawasan Pariwisata berupa lokasi pariwisata budaya Kampung Mahmud, Makom Mahmud, dan Situs Sumur Bandung Lagadar (Istri);
g. Kawasan Permukiman berupa Kawasan Permukiman Perkotaan;
h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa Kantor Kepolisian Sektor Margaasih; dan
i. Kawasan Strategis berupa Kawasan Perkotaan Margahayu-Margaasih.
j. PKN (Pusat Kegiatan Nasional) Bandung Raya Soreang-Kutawaringin-Katapang-Margahayu-Margaasih;
k. Rencana pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya.

Membaca Rencana Tata Ruang Wiyah Kabupaten Bandung 2024–2044, untuk wilayah Margaasih merupakan wilayah strategis yang dimana terletak di antara perbatasan Kota Cimahi, dan Kota Bandung, dimana Kecamatan Margaasih memiliki potensi sebagai kawasan pemukiman, sehingga margaasih saat ini merupakan salah satu kecamatan yang terus berkembang. Selain kawasan pemukiman, Kecamatan Margaasih juga sangat berpotensi sebagai pusat pariwisata religi dimana ada Kampung Mahmud yang sangat terkenal sebagai wisata religi.

2.2.4 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai dengan Pelayanan Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu rangkaian analisis yang sistematis, komprehensif, dan partisipatif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi landasan dan terintegrasi penuh dalam perumusan kebijakan, rencana, dan program di suatu wilayah. Dengan demikian, KLHS berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari sebuah kebijakan sejak tahap awal perencanaan, sehingga dapat mencegah kerusakan ekosistem dan menjamin kesejahteraan masyarakat.

Bapperida Kabupaten Bandung telah melaksanakan kajian mendalam terkait isu-isu strategis yang akan menjadi fondasi bagi penyusunan strategi pembangunan berkelanjutan yang lebih terfokus dan efisien. Adapun muatan KLHS RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Bandung menitikberatkan pada 9 isu strategis pembangunan berkelanjutan, dari 9 isu strategis tersebut yang beririsan dengan wewenang Kecamatan Margaasih adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 12 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan kecamatan margaasih

No	Isu PB Prioritas Berdasarkan 203 Indikator	TPB yang mendukung Isu PB
1	Tingginya kerentanan masyarakat miskin dan kualitas konsumsi pangan mengakibatkan prevalensi stunting dan malnutrisi meningkat'	TPB 1: Tanpa Kemiskinan Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun
2	Rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) mengakibatkan rendahnya kualitas hidup Masyarakat	TPB 3: Kesehatan yang baik dan kesejahteraan Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
		TPB 4: Pendidikan bermutu Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
3	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	TPB 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Sumber: KLHS RPJMD, 2025

Sebagai entitas administratif yang terus berevolusi, Kecamatan Margaasih memiliki posisi strategis dalam mengatasi tantangan pembangunan secara berkelanjutan. Untuk itu, Kecamatan Margaasih memprioritaskan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui sinergi dengan Pemerintah Kabupaten, pemerintah desa, dan keterlibatan aktif dari masyarakat, Komitmen ini diwujudkan melalui formulasi dan implementasi program serta kegiatan yang mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan memadukan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, pembangunan di Kecamatan Margaasih dirancang untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya, menegakkan keadilan sosial, dan memperkuat ketahanan wilayah dalam jangka panjang

2.2.5 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Margaasih

Permasalahan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang tidak ideal atau hambatan yang memerlukan penyelesaian. Isu-isu ini sering kali timbul dari adanya kesenjangan antara realitas yang ada dengan harapan atau tujuan yang ingin dicapai.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Margaasih, yaitu memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, melaksanakan tugas umum pemerintahan, dan memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, beberapa permasalahan telah teridentifikasi. Permasalahan tersebut mencakup:

Tabel 2.13 Pemetaan Masalah Pelayanan Kecamatan Margaasih

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan belum optimal	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai	Jumlah aparatur kecamatan sangat-sangat kurang dan terbatas, jika di bandingkan dengan analisis jabatan yang dilakukan, jumlah SDM dari 30 orang yang dibutuhkan, hanya terpenuhi 15 orang. Sehingga ada 1 pegawai yang mengerjakan 3 sampai 4 tupoksi, dan ada beberapa pegawai yang tidak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			mengerjakan tupoksi sama sekali
			Rekrutmen pegawai tidak sebanding dengan kebutuhan, banyak pegawai pensiun, sementara tidak adanya pegawai baru yang dating.
			Kualitas SDM banyak yang tidak sesuai dengan tugas yang diemban
		Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja kecamatan yang masih perlu ditingkatkan	Pemahaman aparatur kecamatan terhadap konsep akuntabilitas kinerja masih terbatas
			Belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang baku dalam penyusunan, pengukuran, dan pelaporan kinerja
			Minimnya pendampingan/assistensi dari instansi pembina dalam penerapan SAKIP di tingkat kecamatan
		Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan	Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas
			Inovasi pelayanan masih rendah
			Belum optimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
		Pengelolaan keuangan dan administrasi desa yang belum tertib	Kapasitas dan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan administrasi masih terbatas

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Margaasih, 2025

Melihat berbagai permasalahan yang ada, diperlukan langkah strategis untuk mendorong peningkatan kinerja secara lebih efektif dan efisien. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, serta target yang telah ditetapkan, pencapaian tujuan Kecamatan Margaasih sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Dinamika lingkungan tersebut dapat menjadi

faktor pendukung atau penghambat bagi organisasi, yang pada akhirnya menciptakan potensi berupa kekuatan dan peluang, maupun tantangan berupa kelemahan dan ancaman yang harus dihadapi secara bijak.

2.2.6 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau permasalahan krusial yang harus diutamakan dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. Isu ini memiliki dampak signifikan, bersifat mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan sangat menentukan keberhasilan tujuan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dengan demikian, isu strategis juga dapat diartikan sebagai peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa depan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2029 terdapat isu strategis yang meliputi tujuh kelompok besar isu yang didalamnya mencakup permasalahan-permasalahan terkait dengan bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yaitu:

1. Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Berkelanjutan serta Ketahanan terhadap Bencana
2. Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3. Penguatan Ekonomi inklusif dan Pengurangan Kemiskinan
4. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
5. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Wilayah
6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
7. Penguatan Ketahanan Sosial serta Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Margaasih, isu strategis yang relevan dengan wewenang Kecamatan adalah poin ke6, yaitu “Transformasi Tata Kelola Pemerintahan”. Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi pelayanan. Berdasarkan hal

tersebut, isu strategis yang spesifik bagi Kecamatan Margaasih telah dirumuskan dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14 Teknik Menyimpulkan
Isu Strategis Kecamatan Margaasih

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelayanan publik tingkat dasar	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai	Rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)	Transformasi Digital	Bonus demografi	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Optimalisasi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik
	Pelaksanaan sistem Akuntabilitas kinerja kecamatan yang masih perlu ditingkatkan	Sinkronisasi program antar OPD belum baik	Belum optimalnya tata Kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata Kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja kecamatan
	Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Transformasi Digital	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan mutu dan konsistensi pelayanan publik yang cepat, mudah,dan akuntabel
	Pengelolaan keuangan dan administrasi desa yang belum tertib	Belum optimalnya tata Kelola pemerintah	Transformasi Digital	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan desa melalui tertib administrasi dan pelaporan

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Margaasih, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan

Renstra Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (Bedas), Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.” Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (Lima) misi pembangunan yaitu:

a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak
b. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan
c. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.
d. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi
e. Menjaga Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Agar visi dan misi tersebut dapat diwujudkan, maka Kecamatan Margaasih menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan berdasarkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang berpedoman kepada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan Kecamatan Margaasih untuk mencapai sasaran dalam RPJMD

Kabupaten Bandung Tahun 20205-2029, sesuai misi ke-3 “mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel” terdapat 1 (satu) tujuan yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” Tujuan ini sekaligus sejalan dengan misi ke-3 Kabupaten Bandung yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.” Dengan berpedoman pada misi tersebut, Kecamatan Margaasih diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya aparatur, memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan, serta membangun sistem kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.1.2 Sasaran

Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Margaasih Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran Kecamatan Margaasih, yaitu “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan”. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Margaasih tahun 2025-2029 sebagaimana pada Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Margaasih

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	0.19	0.22	0.24	0.25	0.26	0.27	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (poin)	90.45	90.65	90.87	91.10	91.34	91.59	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R) Nomor 14 Tahun 2017

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Margaasih, 2025

3.2 Strategi Kecamatan Margaasih dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Margaasih Tahun 2025-2029

Strategi dan kebijakan Kecamatan Margaasih dalam rangka pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai – nilai yang berkembang dalam internal organisasi serta situasi dan kondisi ekternal di lingkungan Kecamatan Margaasih antara lain :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Margaasih

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana serta mekanisme pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat	Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta membangun pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui penerapan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat yang berkelanjutan
Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Margaasih, 2025

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Margaasih dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Margaasih Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD

dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Margaasih

No	Sasaran RPJMD yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal	Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan	

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Margaasih, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih terperinci ke dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan yang disertai dengan indikator kinerja untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung merupakan program yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang disertai dengan indikator keluaran program yang diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Bandung sesuai periodisasi RPJMD Kabupaten Bandung.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Program, kegiatan dan subkegiatan tersebut disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan Kecamatan Margaasih selama periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Kecamatan Margaasih

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN MARGAASIH							
- Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik				Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Nilai IKM		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN RI Nomor 14 Tahun 2017
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
					Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Maturitas Manajemen Risiko (MR) Perangkat Daerah
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data Statistik Sektoral Daerah	dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang harus disusun x
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi x
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun x 100%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik / Jumlah Aset Barang Milik Daerah x 100%

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya urusan pelimpahan kepada camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan / jumlah kegiatan yang direncanakan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan x 100%
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina / Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan x 100%

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			pemberdayaan masyarakat				
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayan desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana / Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	7.01.03.2.06.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
				Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib		Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah koordinasi penegakkan perda yang berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan / Jumlah koordinasi penegakkan perda yang direncanakan berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
							terlaksana / Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
				Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan		Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penugasan Kepala Daerah / Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan		Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa / Jumlah perencanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi / Total jumlah desa x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Sumber: SIPD RI RENSTRA, 2025

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 - KECAMATAN				5.639.452.411,00		5.418.749.400,00		5.537.839.000,00		5.598.104.100,00		5.827.529.940,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.002.523.008,00		4.953.247.000,00		4.953.247.000,00		4.953.247.000,00		4.953.247.000,00	S 3.1
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60	61	5.002.523.008,00	61.5	4.953.247.000,00	62	4.953.247.000,00	62.5	4.953.247.000,00	63	4.953.247.000,00	
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	45.28	46		47		48		49		50		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.056.008,00		9.280.000,00		9.280.000,00		9.280.000,00		9.280.000,00	
Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	10.056.008,00	6	9.280.000,00	6	9.280.000,00	6	9.280.000,00	6	9.280.000,00	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.556.008,00		4.780.000,00		4.780.000,00		4.780.000,00		4.780.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	5.556.008,00	6	4.780.000,00	6	4.780.000,00	6	4.780.000,00	6	4.780.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.515.687.000,00		4.515.687.000,00		4.515.687.000,00		4.515.687.000,00		4.515.687.000,00	
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	20	4.515.687.000,00	20	4.515.687.000,00	20	4.515.687.000,00	20	4.515.687.000,00	20	4.515.687.000,00	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2		2		2		2		2		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4		4		4		4		4		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.505.687.000,00		4.505.687.000,00		4.505.687.000,00		4.505.687.000,00		4.505.687.000,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	20	4.505.687.000,00	20	4.505.687.000,00	20	4.505.687.000,00	20	4.505.687.000,00	20	4.505.687.000,00	
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Administrasi BMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				22.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	20	22.500.000,00	20	2.500.000,00	20	2.500.000,00	20	2.500.000,00	20	2.500.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	4		4		4		4		4		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20	20		20		20		20		20		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				10.000.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20	20	10.000.000,00	20	750.000,00	20	750.000,00	20	750.000,00	20	750.000,00	
7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2.500.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	4	2.500.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	20	10.000.000,00	20	750.000,00	20	750.000,00	20	750.000,00	20	750.000,00	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				53.500.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00	
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	53.500.000,00	12	32.000.000,00	12	32.000.000,00	12	32.000.000,00	12	32.000.000,00	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	0		5		5		5		5		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	20		20		20		20		20		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12		12		12		12		12		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	15.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	0	-	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.500.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	2.500.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	3.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	10.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	20	20.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0		1		1		1		1		
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	-	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	-	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1	10.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				280.780.000,00		280.780.000,00		280.780.000,00		280.780.000,00		280.780.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	280.780.000,00	12	280.780.000,00	12	280.780.000,00	12	280.780.000,00	12	280.780.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	72		72		72		72		72		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300	300		300		300		300		300		
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300	300	3.000.000,00	300	3.000.000,00	300	3.000.000,00	300	3.000.000,00	300	3.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	34.000.000,00	12	34.000.000,00	12	34.000.000,00	12	34.000.000,00	12	34.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				243.780.000,00		243.780.000,00		243.780.000,00		243.780.000,00		243.780.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	72	243.780.000,00	72	243.780.000,00	72	243.780.000,00	72	243.780.000,00	72	243.780.000,00	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				105.000.000,00		103.000.000,00		103.000.000,00		103.000.000,00		103.000.000,00	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	11	105.000.000,00	11	103.000.000,00	11	103.000.000,00	11	103.000.000,00	11	103.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0		1		1		1		1		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	11	100.000.000,00	11	90.000.000,00	11	90.000.000,00	11	90.000.000,00	11	90.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	1	5.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				230.809.300,00		80.000.000,00		438.092.000,00		80.000.000,00		727.782.940,00	S 3.1
Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	100	100	230.809.300,00	100	80.000.000,00	100	438.092.000,00	100	80.000.000,00	100	727.782.940,00	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				230.809.300,00		80.000.000,00		438.092.000,00		80.000.000,00		727.782.940,00	
Terselenggaranya urusan pelimpahan kepada camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	12	230.809.300,00	5	80.000.000,00	5	438.092.000,00	5	80.000.000,00	5	727.782.940,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				230.809.300,00		80.000.000,00		438.092.000,00		80.000.000,00		727.782.940,00	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	12	230.809.300,00	5	80.000.000,00	5	438.092.000,00	5	80.000.000,00	5	727.782.940,00	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				249.121.730,00		53.000.000,00		53.000.000,00		53.000.000,00		53.000.000,00	S 3.1
Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	100	100	249.121.730,00	100	53.000.000,00	100	53.000.000,00	100	53.000.000,00	100	53.000.000,00	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				119.741.730,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	6	119.741.730,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				119.741.730,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	6	119.741.730,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				57.380.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00	
Terselenggaranya fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1	1	57.380.000,00	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	1		1		1		1		1		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				17.380.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	1	17.380.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				30.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1	1	30.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				72.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10	20	72.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10	20		10		10		10		10		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	10	20		10		10		10		10		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	10	20		10		10		10		10		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10	20		10		10		10		10		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	10	20		10		10		10		10		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10	20		10		10		10		10		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10	20		10		10		10		10		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10	20		10		10		10		10		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10	20		10		10		10		10		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10	20		10		10		10		10		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10	20		10		10		10		10		
7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				6.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	10	20	6.000.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				6.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10	20	6.000.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				6.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10	20	6.000.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	
7.01.03.2.06.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				6.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	10	20	6.000.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	
7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				6.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	10	20	6.000.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				6.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10	20	6.000.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				6.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10	20	6.000.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	
7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				6.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10	20	6.000.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				6.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10	20	6.000.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				6.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10	20	6.000.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				6.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10	20	6.000.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				6.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10	20	6.000.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				50.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	S 3.1
Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	50.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				30.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	2	30.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	2		2		2		2		2		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				20.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	2	20.000.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				10.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	2	10.000.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				20.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6	6	20.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				20.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6	6	20.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				71.998.373,00		54.500.000,00		54.500.000,00		54.500.000,00		54.500.000,00	S 3.1

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	71.998.373,00	100	54.500.000,00	100	54.500.000,00	100	54.500.000,00	100	54.500.000,00	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				71.998.373,00		54.500.000,00		54.500.000,00		54.500.000,00		54.500.000,00	
Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	71.998.373,00	12	54.500.000,00	12	54.500.000,00	12	54.500.000,00	12	54.500.000,00	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	150		50		50		50		50		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	50		50		50		50		50		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				31.998.373,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	150	31.998.373,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				30.000.000,00		34.500.000,00		34.500.000,00		34.500.000,00		34.500.000,00	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	30.000.000,00	12	34.500.000,00	12	34.500.000,00	12	34.500.000,00	12	34.500.000,00	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				35.000.000,00		268.002.400,00		29.000.000,00		447.357.100,00		29.000.000,00	S 3.1
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	100	100	35.000.000,00	100	268.002.400,00	100	29.000.000,00	100	447.357.100,00	100	29.000.000,00	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				35.000.000,00		268.002.400,00		29.000.000,00		447.357.100,00		29.000.000,00	
Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	35.000.000,00	4	268.002.400,00	0	29.000.000,00	2	447.357.100,00	0	29.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6	6		6		6		6		6		
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6	6		6		6		6		6		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6	6		6		6		6		6		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6	6	5.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6	6	5.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				5.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6	6	5.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-		241.002.400,00		-		419.357.100,00		-	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	-	4	241.002.400,00	0	-	2	419.357.100,00	0	-	
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				20.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2	2	20.000.000,00	2	18.000.000,00	2	20.000.000,00	2	19.000.000,00	2	20.000.000,00	

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Margaasih, 2025

Ket.

S.3.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH : Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien

4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Bandung dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan merumuskan program-program pembangunan daerah dengan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Dalam periode masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan periode berlakunya RPJMD, Bupati Bandung menetapkan 13 prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan. Kecamatan Margaasih, sebagai perangkat daerah yang berperan dalam mendukung pencapaian visi Kabupaten Bandung, berkontribusi pada pelaksanaan misi 3 yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”. Dukungan tersebut diwujudkan melalui prioritas pembangunan daerah diantaranya Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik. Adapun daftar subkegiatan prioritas Kecamatan Margaasih dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Margaasih, 2025

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Margaasih tahun 2025-2029 dirumuskan secara sistematis melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan terukur. Penyusunan IKU dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja yang mengacu pada prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*), guna memastikan bahwa setiap indikator mampu mencerminkan pencapaian pembangunan secara objektif dan akuntabel. IKU tidak hanya menjadi alat ukur pencapaian tujuan, tetapi juga berfungsi sebagai dasar evaluasi kinerja Kecamatan margaasih pada akhir periode perencanaan.

Penetapan indikator ini juga memperhatikan keterkaitan dan keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, sehingga pelaksanaan Renstra di tingkat kecamatan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian pembangunan daerah secara keseluruhan. Adapun secara rinci, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Margaasih Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada struktur tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung sebagaimana terlihat pada penjabaran Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut ini.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0,19	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Margaasih, 2025

Penetapan Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai IKU dimaksudkan untuk memberikan ukuran yang jelas, terukur, dan berbasis data dalam menilai kinerja pelayanan publik. IKM mencakup berbagai

aspek layanan, antara lain kecepatan, ketepatan, keramahan, kemudahan prosedur, serta kepastian biaya dan waktu pelayanan. Oleh karena itu, laju IKM menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana pelayanan publik Kecamatan Margaasih memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat.

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Untuk mendukung tujuan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029, Kecamatan Margaasih menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK ini menjadi alat ukur keberhasilan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, memastikan setiap program dan kegiatan di tingkat kecamatan terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dengan adanya indikator yang jelas, pemerintah kecamatan berkomitmen untuk menciptakan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. IKK Kecamatan Margaasih adalah Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Laju IKM merujuk pada tingkat perubahan atau pertumbuhan nilai IKM dari satu periode ke periode berikutnya. Berbeda dengan IKM yang menggambarkan tingkat kepuasan pada satu titik waktu, laju IKM menunjukkan seberapa cepat atau signifikan peningkatan (atau penurunan) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dari tahun ke tahun.

Dengan menjadikan laju IKM sebagai IKK, Kecamatan Margaasih tidak hanya mengejar tingkat kepuasan yang tinggi, tetapi juga memastikan bahwa ada perbaikan berkelanjutan dan percepatan peningkatan kualitas pelayanan dari waktu ke waktu. Laju IKM dievaluasi setiap tahun dari 2025–2029 untuk mengidentifikasi kendala, melakukan perbaikan, dan memperkuat pelayanan yang sudah baik.

Target laju IKM Kecamatan Margaasih selama periode 2025–2029 disajikan dalam tabel sebagai acuan peningkatan yang konsisten. Dengan target yang terukur, Kecamatan Margaasih diharapkan dapat menjaga kualitas layanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bandung secara menyeluruh.

Penjabaran Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Margaasih Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0.19	0.22	0.24	0.25	0.26	0.27	Persentase dari selisih nilai IKM Di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Margaasih, 2025

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra Kecamatan Margaasih Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai acuan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Margaasih. Dokumen ini menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas kecamatan yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Seluruhnya disusun dengan pendekatan teknokratis dan partisipatif yang berorientasi pada hasil, guna memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan berjalan secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan Kecamatan Margaasih mampu memperkuat peran strategisnya sebagai ujung tombak pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah, serta mendukung secara nyata pencapaian visi Kabupaten Bandung yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 disusun melalui berbagai tahapan yakni tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Camat Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung sebagai penanggungjawab pelaksanaan Renstra Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, dan bersama Bapperida akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.

b. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
c. Renstra Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung akan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung setiap tahunnya. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan program dan kegiatan, maka dalam penyusunannya Renja Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bandung.
d. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung setiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas Renstra Kecamatan Margaasih dalam mencapai sasaran Renstra.
e. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung diperlukan adanya perbaikan atau perubahan Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan Perubahan Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bandung dilakukan Perubahan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundangundangan yang berlaku

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Renstra Kecamatan Margaasih 2025–2029 merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran, diterapkan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang sistematis.

- Pengendalian: memastikan program dan kegiatan sesuai rencana dari segi waktu, anggaran, dan capaian kinerja, dilakukan melalui monitoring triwulan dan semester.
- Evaluasi: menilai efektivitas dan efisiensi pembangunan, baik pencapaian indikator kinerja maupun dampaknya bagi masyarakat. Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar penyusunan Renja tahun berikutnya, LKIP, serta perbaikan strategi dan kebijakan secara berkelanjutan. Renstra ini diharapkan mampu menjadikan Kecamatan Margaasih lebih adaptif, responsif, dan menghasilkan kinerja yang efektif serta bermanfaat nyata bagi masyarakat. Masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, dokumen ini diharapkan dapat diimplementasikan secara optimal demi mendukung terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih BEDAS, Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.

Margaasih, September 2025

CAMAT MARGAASIH

Ttd

DJOKO MARDIANTO

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

2.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin.....	26
2.2	Jumlah Pegawai Kecamatan MargaasihKabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	27
2.3	Data Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Margaasih Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025.....	27
2.4	Sumber Daya yang dimiliki (asset/modal).....	28
2.5	Klasifikasi Aset berdasarkan Kondisi.....	29
2.6	Luas Wilayah administrasi Kecamatan Margaasih.....	30
2.7	Jumlah Penduduk kecamatan Margaasih 2025.....	30
2.8	Tabel Proyeksi Jumlah Penduduk Per Desa 2025–2030.....	31
2.9	Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Margaasih Tahun 2021-2026 Kecamatan Margaasih.....	34
2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.....	37
2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.....	46
2.12	Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan kecamatan margaasih.....	64
2.13	Pemetaan Masalah Pelayanan Kecamatan Margaasih.....	65
2.14	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Margaasih.....	68
3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Margaasih.....	70
3.2	Penahapan Renstra Kecamatan Margaasih.....	71
3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Margaasih.....	72
4.1	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Kecamatan Margaasih.....	74
4.2	Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan.....	85
4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	107

4.4 Indikator Kinerja Utama PD..... 108
4.5 Indikator Kinerja Kunci..... 110

DAFTAR GAMBAR

2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Margaasih 25